



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN



BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dimana kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi NTB meliputi bidang:

- a. Bidang Pekerjaan Umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (Perkotaan dan Perdesaan, Air minum, Air limbah, Persampahan, Drainase, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
- b. Bidang Penataan Ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dan 5 (lima) Balai/UPTD yang berada di bawah koordinasi Dinas PUPR yaitu: Balai Pemeliharaan Jalan P. Lombok, Balai Pemeliharaan Jalan P. Sumbawa, Balai PSDA P. Lombok, Balai PSDA P. Sumbawa dan Balai Pengujian.

Pelaksanaan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan 2 Misi Pembangunan Daerah yaitu Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP dan Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI. Pada Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin.

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan indikator kinerja Meningkatnya Kemantapan Jalan dan Meningkatnya Kemantapan Sistem Irigasi. Pada Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI dengan sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum.

Pada Tahun 2022 Target Capaian Kinerja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Utama Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan capaian kerjanya berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2022

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Kemantapan jalan	80,76	80,05	83,95	84,01	85,36	84,52
2	Cakupan Air Minum	75,74	74,88	76,48	78,76	78,45	79,11
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	48,11	48,11	50,04	50,88	52,91	54,50
	Cakupan Areal layanan Irigasi (Indikator Kinerja OPD)	0	0	76,12	75,52	77,00	77,60
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	0	0	9,09	9,09	18,18	14,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi	Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2022	Target
			Target	Target	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6		10
	Aspek: Pelayanan Umum						
	Fokus: Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	Bidang Urusan: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP							
1	Persentase Jalan Mantap	%	83,95	85,36	86,00	84,52	86,00
2	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	52,17	54,50	52,91	54,50
	Cakupan Areal Layanan Irigasi (Indikator Kinerja OPD)	%	76,12	77,00	77,83	77,60	77,83
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI							
3	Cakupan Air Minum	%	76,48	78,45	80,59	79,11	80,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

Capaian kinerja indikator bidang urusan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap

Panjang Jalan di Provinsi NTB sebesar 8.047,29 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 937,96 Km, Jalan Provinsi 1.484,43 Km dan Jalan Kabupaten/Kota 5.624,9 Km. Penanganan jalan provinsi dilakukan melalui sumber dana dari APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sasaran strategis ini ditentukan indikator kinerja adalah Persentase Jalan Mantap.

Pada tahun 2022, kinerja jalan mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 84,52 %, hal ini terjadi karena adanya dukungan penanganan jalan melalui program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan sumber dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2022 serta program penanganan jalan dan jembatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar 84,52 %, naik sebesar 0,51 % dari tingkat kemantapan jalan tahun 2021 yang tercatat sebesar 84,01 %, namun capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85,36 %. Pencapaian tingkat kemantapan jalan dibawah nilai target yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan akibat keterbatasan anggaran di masa pandemi Covid-19, masih tingginya pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (over-dimension over-loading/ODOL) serta kerusakan dini akibat bencana alam (curah hujan tinggi dan perubahan tata guna lahan). Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

b. Persentase Kemantapan Sistem Irigasi

Indikator kinerja Bidang Sumber Daya Air adalah Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57%), sedang 86,05 km (12%), rusak ringan 61,78 km (9%) dan rusak berat 161,03 km (22%). Capaian Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Provinsi NTB Pada tahun 2022 dengan target sebesar 52,17 % telah melampaui target menjadi 52,91 %.

c. Cakupan Air Minum

Indikator cakupan air minum merupakan salah satu indikator strategis bidang PUPR. Berdasarkan data, Cakupan Air Minum di Provinsi NTB Pada Tahun 2022 mencapai 79,11% telah melampaui target RPJMD sebesar 78,45 %.

2. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan:

Capain kinerja indikator Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan 4 (empat) program prioritas yang saling bersinergi satu sama lain. Adapun capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Tabel Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	85.36%	84.52%		
		Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi					
		Sub Keg : Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur)	49 Km / 468 Meter	47.7 Km / 443 Meter		
		Paket 1 : Masbagik - Pancor, Kruak - Pancor, Jembatan Maronggek		5.25 Km / 30 Meter	5.25 Km / 30 Meter		
		Paket 2 : Kruak - Lb. Haji, Jembatan Korleko		6.76 Km / 25 Meter	6.76 Km / 25 Meter		
		Paket 3 : Batunyala - Sengkol, Kediri - Praya, Bengkel - Kediri		6.86 Km / 0 Meter	6.86 Km / 0 Meter		
		Paket 4 : Rembiga - Pemenang		8.62 Km / 0 Meter	8.62 Km / 0 Meter		
		Paket 5 : Jln. Yos Sudarso (mataram), Jl. Langko (Mataram), Jalan Penjanggik (Mataram), Jl. Selaparang (Mataram)		7.7 Km / 0 Meter	7.7 Km / 0 Meter		
		Paket 6 : Jl. Ade Irma Suryani (Mataram), Jl. Prabu Rangka sari (Mataram), Jl. Brawijaya		4.93 Km / 0 Meter	4.93 Km / 0 Meter		

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(Mataram), Simpang 4 Tanah Aji					
		Paket 7 : Jl. Catur Warga (Mataram), Jl. Pendidikan (Mataram), Jembatan Karang Sukun		2.87 Km / 25 Meter	1.57 Km / 0 Meter	Belum tuntasnya proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Catur Warga dan Jembatan Kr. Sukun	Dilakukan pengurangan target penanganan jalan dan jembatan (membatalkan pekerjaan pelebaran Jalan Catur Warga dan Jembatan Kr. Sukun)
		Paket 8 : Sejong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III		5 Km / 70 Meter	5 Km / 70 Meter		
		Paket 9 : Pal IV - Lenangguar, Lenangguar - Lunyuk, Lenangguar - Batu Rotok		30.30 Km / 0 Meter	30.30 Km / 0 Meter		
		Paket 10 : Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka		1.0 Km / 20 Meter	1.0 Km / 20 Meter		
		Paket 11 : Sp. Kempo - Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III, Jembatan Kawinda VI		5 Km / 46 Meter	5 Km / 46 Meter		
		Paket 12 : Sila - Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V, Jembatan Piong VI		4 Km / 73 Meter	4 Km / 73 Meter		
		Paket 13 : Kiwu - Sampungu, Jembatan Sori Kari'i, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa		6.35 Km / 39 Meter	6.35 Km / 39 Meter		
		Paket 14 : Karumbu - Sape, Talabiu - Simpasai, Simpasai - Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V		2.1 Km / 90 Meter	2.1 Km / 90 Meter		
		Paket 15 : Jl. Gajah Mada (Bima), Jl. Datuk Dibanta (Bima), Jembatan Salo		10.40 Km / 20 Meter	16.60 Km / 20 Meter		
		Paket 16 : Bima - Tawali, Tawali - Sape		11.35 Km / 0 Meter	11.35 Km / 0 Meter		

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Paket 17 : Jembatan Brang Lepu I, Jembatan Brang Lepu II		0,00 Km / 30 Meter	0,00 Km / 30 Meter	Proses pembebasan lahan yang cukup lama yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan (progres fisik pada akhir Tahun 2022 sebesar 87,40%)	Dilakukan addendum pemberian kesempatan kerja selama 50 hari kalender (2 Januari - 19 Desember 2023) yang akan disertai dengan penerapan denda atas keterlambatan
		Program DAK		5,0 Km	5,0 Km		
		Pembangunan Jalan Sekokat - Bawi (DAK)		5,0 Km	5,0 Km		
		Sub Keg : Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang dilebarkan	3,98 Km	3,98 Km		
		Pelebaran Jalan Kuta - Kruak (DAK)		3,98 Km	3,98 Km		
		Sub Keg : Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang di rekonstruksi	1,60 Km	2,20 Km		
		Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Piong - Sp. Kore (DAK)		2,20 Km	2,20 Km		
		Sub Keg : Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	0,10 Km	0,10 Km		
		Rehabilitasi Jalan Simpasai - Parado		0,05 Km	0,05 Km		
		Rehabilitasi Jalan SP. Pengantap-Mt. Ajan - Kuta		0,05 Km	0,05 Km		
		Sub Keg : Penggantian Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan yang diganti/dibangun	75 Meter	75 Meter		
		Penggantian Jembatan Bengkang (DAK)		15 Meter	15 Meter		
		Penggantian Jembatan Sori Molu (DAK)		15 Meter	15 Meter		
		Penggantian Jembatan Tebek (DAK)		25 Meter	25 Meter		
		Sub Keg : Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	20 Meter	20 Meter		
		Penggantian Jembatan Sori Bura dan Gorong-gorong ruas Lb. Kenanga -Kawinda To'i		20 Meter	20 Meter		

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Cakupan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Air Minum	78,45%	79,11%		
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					
		Sub Kegiatan : Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan					
		SPAM Dusun Bebak Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah		100 KK	100 KK		
		SPAM Dusun Bisok Bokah Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah		160 KK	160 KK		
		SPAM Dusun Kali Bening Desa Mamben Daya Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur		300 KK	300 KK		
		SPAM Dusun Karang Anyar Timuk Desa Mamben Lauk Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur		350 KK	350 KK		
		SPAM Dusun Lingkok Marang Desa Kotaraja Kec. Sikur Kab. Lombok Timur		50 KK	50 KK		
		SPAM Pemotoh Tengah Desa Aik Berik kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah		250 KK	250 KK		
		SPAM Lingkungan Karang Baru Barat Desa Sasake Kec.Praya Tengah Kab. Lombok Tengah		200 KK	200 KK		
		SPAM Masjid Nurul Iman Dusun Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kec. Masbagik Kab.Lombok Timur		180 KK	180 KK		
		Jaringan perpipaan Air Bersih Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai, kab. Sumbawa					
		Pembanguna SPAM Air Bersih Pondok Pesantren Al-Majidiah Kab.Sumbawa		50 KK	50 KK		

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		SPAM Desa Klungkung Kec.Batu Lanteh Kab.Sumbawa		500 KK	5000 KK		
		SPAM Desa Mumbul Sari Kec. Bayan Kab.Lombok Utara		350 KK	350 KK		
		SPAM Desa Tete Batu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur		380 KK	380 KK		
		SPAM Dusun Sangiang Desa Selengen Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara		150 KK	150 KK		
		SPAM Dusun Sukarara Utara Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur		40 KK	40 KK		
		Air Bersih Jaran Pusang Desa Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa		400 KK	400 KK		
		Pembangunan perpipaan air minum pipa 2 inci Kel. UPT Perode SP III Kec. Plampang Kab. Sumbawa DESA PRODE SP 3, Kab. Sumbawa		350 KK	350 KK		
		Saluran Air Bersih Kel. Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur Desa Wanasaba. Kec.Wanasaba. Kab. Lombok Timur		500 KK	500 KK		
		Pembangunan SPAM Desa Gontoran Kec. Narmada Kab. Lombok Barat		450 KK	450 KK		
		Pembangunan SPAM Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara		300 KK	300 KK		
		Pembangunan SPAM Desa Kekait Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat		250 KK	250 KK		
		Pembangunan SPAM Desa Menggala Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara		150 KK	150 KK		

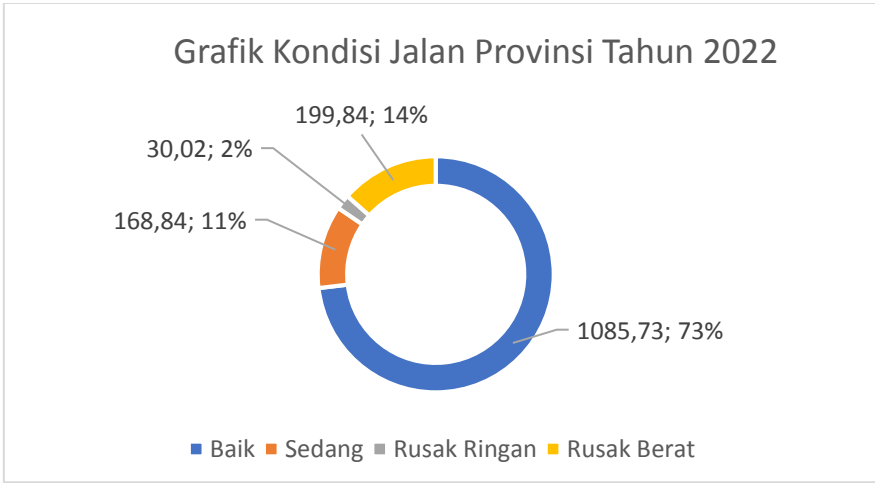
NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembangunan SPAM Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat		300 KK	300 KK		
		Pembangunan SPAM Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara		450 KK	450 KK		
		Pembangunan SPAM Desa Pengadangan Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur		450 KK	450 KK		
		Pembangunan SPAM Dusun Barung Birak Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara		300 KK	300 KK		
		Pembangunan SPAM Dusun Lenggorong Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara		250 KK	250 KK		
		SPAM Dusun Batulayar utara Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kab Lombok Barat		50 KK	50 KK		
		Pembangunan SPAM Ulem-Ulem Berseri Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kec. Sikur Kab.Lombok Timur		450 KK	450 KK		
		SPAM SMK IT Pancor Dao Batukliang Kab. Lombok Tengah		100 KK	100 KK		
3	Persentase Kemandapan Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	77,00%	77,60%		
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gebong (DAK)		912 Ha	1.304 Ha		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pelapak (DAK)		1.096 Ha	1.113 Ha		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Embung Gapit (DAK)		672 Ha	686 Ha		
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	18.18%	14.54%		
		Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		1 dokumen	1 dokumen		
		Sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota					
		Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1 dokumen	1 dokumen		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					
		RTRW Provinsi NTB		1 Dokumen	-		
		RTRW Kabupaten Lombok Timur		1 Dokumen	-		
		RTRW Kabupaten Sumbawa Barat		1 Dokumen	1 Dokumen		
		RTRW Kota Mataram		1 Dokumen	1 Dokumen		
		RDTR Perkotaan Taliwang		1 Dokumen	1 Dokumen		
		RDTR Perkotaan Tanjung		1 Dokumen	1 Dokumen		
		RDTR Perkotaan Mandalika		1 Dokumen	1 Dokumen		
		RDTR Perkotaan Rasanae Barat		1 Dokumen	1 Dokumen		
		RDTR Perkotaan Monta		1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		RDTR Perkotaan Mpunda		1 Dokumen	1 Dokumen		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2022 ditargetkan kemantapan jalan sebesar 85.36 % dengan capaian 84.52 %, seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2019-2023 dan Renstra Revisi Dinas PUPR. Pencapaian target kemantapan jalan ini melalui dukungan penanganan jalan melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2020 - 2022 (Perda Percepatan Jalan) dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi untuk kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.



Gambar 1. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022

Di Bidang Sumberdaya Air, pada tahun 2022 capaian realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Areal Irigasi sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 mencapai 77,60 % melampaui capaian targetnya (77,00 %). Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57%), sedang 86,05 km (12%), rusak ringan 61,78 km (9%) dan rusak berat 161,03 km (22%). Dalam rangka pencapaian target

indikator kinerja pada tahun 2022 sebagaimana yang diharapkan, pembiayaan penanganan Daerah Irigasi (DI) selain bersumber dari dana APBD juga bantuan dari Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Operasi serta Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air (PSDA) Pulau Lombok dan PSDA Pulau Sumbawa.



Gambar 2. Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2022 sebagaimana yang diharapkan, pembiayaan penanganan Daerah Irigasi (DI) selain bersumber dari dana APBD juga bantuan dari Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Operasi serta Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air (PSDA) Pulau Lombok dan PSDA Pulau Sumbawa.

Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Persentase Kemantapan Sistem Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Sumberdaya Air Tahun Anggaran 2022

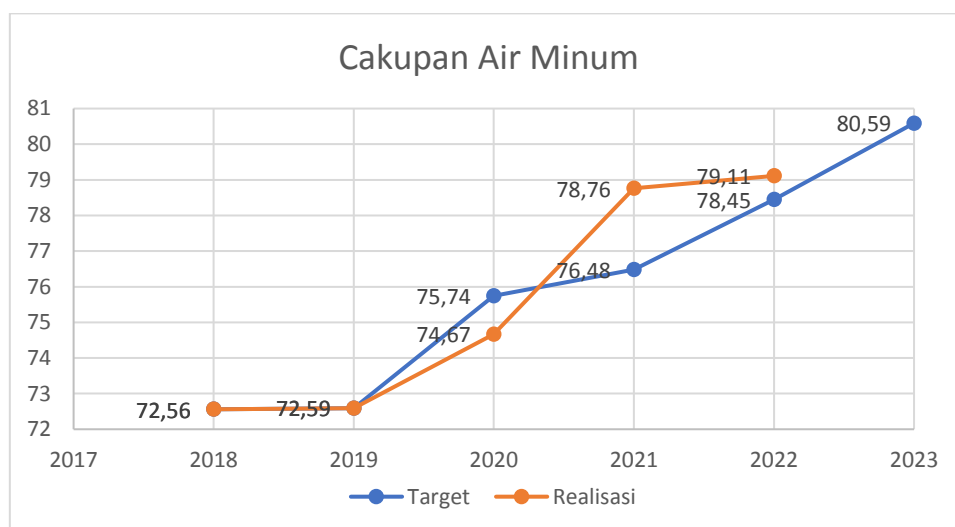
Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	77,00	77,60	100%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit	11	11	100%
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok	5	5	100%
Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi	28	28	100%
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah	20	20	100%
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set	3	3	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	300	150	50%
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi	20	20	100%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Tebing sungai yang dipelihara	Buah	200	200	100%
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi	97	97	100%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha	1006	1.000	99%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok	5	5	100%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI	7	7	100%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI	1	1	100%
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha	1000	1.000	100%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI	7	7	100%
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI	19	19	100%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

Sedangkan untuk capaian realisasi indikator kinerja Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi sesuai dengan sasaran strategis Dinas PUPR Provinsi NTB yang tertuang dalam Revisi Renstra 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas mencapai 77,60% melebihi capaian targetnya (77,00%) dengan tingkat capaian 100%, Dari capaian yang telah melampaui target masih terdapat beberapa tantangan di bidang sumber daya air diantaranya (a) alih fungsi lahan produktif menjadi perdagangan dan industri, serta alih fungsi kawasan penyangga tangkapan air menyebabkan tingginya sedimentasi pada jaringan irigasi; (b) kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya

kebutuhan air irigasi; (c) pemanfaatan air irigasi yang bukan peruntukannya sebagai perikanan menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan air lahan; dan (d) inventarisasi data tanam dan produktivas yang belum dapat terpenuhi.

Indikator kinerja dengan sasaran strategis Cakupan Air Minum, pada tahun 2022 realisasi kinerja telah mencapai 79,11 % melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra sebesar 78,45 %. Tercapainya target cakupan air minum ini dikarenakan adanya dukungan penanganan dan pembiayaan secara bersinergi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sumber pembiayaan tersebut meliputi program/kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten.



Gambar 3. Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2018-2022 dan Rencana Target Tahun 2023

Di bidang Tata Ruang dengan Indikator Sasaran strategis Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR) capaian realisasinya pada tahun 2022 mencapai 14,54% tidak tercapai dengan targetnya (18,18 %) yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Pada Bidang Bina Marga, capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Persentase Jalan Mantap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bidang Jalan Tahun Anggaran 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	%	85,36	84.52	99,02%
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km	49,68	48.38	97,38%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan Lokasi km unit	2 ; 12 ; 20 ; 6	2 ; 12 ; 20 ; 6	100%
Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km	-	-	-
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit	1484,43 ; 784	1484,43 ; 784	100%
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km	44	42,7	97,05%
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang dilebarkan	km	3.98	3.98	100%
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	km	1,60	1,60	100%
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	0.10	0.10	100%
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	-	-	-
Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	m	75,00	75,00	100%
Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	20,00	20,00	100%
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok	2	2	100%

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2022

3. Pelaksanaan dan Capaian Program Unggulan:

a. Percepatan Jalan Mantap

Kemantapan Jalan provinsi tahun 2022 mencapai 84.52 % yang setara dengan 1.254,57 km dalam keadaan mantap dari total jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Adapun kemantapan Jalan Nasional tahun 2022 mencapai 97,04 % atau setara dengan 910,23 Km, dari total jalan nasional sepanjang 937,96 Km.

Keseimbangan aksesibilitas antar wilayah dan antar sektor harus dijaga sehingga mewujudkan pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan di Provinsi NTB pada tahun 2022, sebagai berikut:

1) Program Percepatan Jalan;

- Paket 1 : Masbagik - Pancor, Kruak - Pancor, Jembatan Maronggek
- Paket 2 : Kruak - Lb. Haji, Jembatan Korleko
- Paket 3 : Batunyalala - Sengkol, Kediri - Praya, Bengkel – Kediri
- Paket 4 : Rembiga – Pemenang
- Paket 5 : Jln. Yos Sudarso (Mataram), Jln. Langko (Mataram), Jln. Pejanggik (Mataram), Jln. Selaparang (Mataram),
- Paket 6 : Jl. Ade Irma Suryani (Mataram), Jln. Prabu Rangka Sari (Mataram), Jl. Brawijaya (Mataram), Simpang 4 Tanah Aji
- Paket 7 : Jl. Catur Warga (Mataram), Jl. Pendidikan (Mataram), Jembatan Kr. Sukun
- Paket 8 : Sejongong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejongong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III
- Paket 9 : Pal IV - Lenangguar, Lenangguar - Lunyuk, Lenangguar - Batu Rotok
- Paket 10 : Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka, Jembatan Brang Lepu I, Jembatan Brang Lepu II
- Paket 11 : Sp. Kempo - Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III, Jembatan Oi Mori VI
- Paket 12 : Sila - Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V, Jembatan Piong VI
- Paket 13 : Kiwu - Sampungu, Jembatan Sori Kari`i, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa
- Paket 14 : Karumbu - Sape, Talabiu - Simpasai, Simpasai - Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V
- Paket 15 : Jl. Gajah Mada (Bima), Jl. Datuk Dibanta (Bima), Jembatan Salo
- Paket 16 : Bima - Tawali, Tawali – Sape
- Paket 17 : Jembatan Brang Lepu I, Jembatan Brang Lepu II

2) Program DAK yaitu:

- Pembangunan Jalan Sekokat – Bawi
- Pelebaran Jalan Kuta-Kruak
- Rekonstruksi Jalan Piong - Sp. Kore
- Penggantian Jembatan Bengkang
- Penggantian Jembatan Sori Molu
- Penggantian Jembatan Tebek

3) Penanganan Bencana Alam

- Penggantian Jembatan Sori Bura dan Gorong-gorong ruas Lb. Kenanga - Kawinda To'i

Tabel 6. Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2022)

Status Jalan	Panjang Jalan(Km)	Satuan	Mantap	Tidak Mantap
Jalan Nasional	937,96	Km	910,23	27,73
		%	97,04	2,96
Jalan Provinsi	1.484,43	Km	1.254,57	229,86
		%	84,52	15,48
Jalan Kab. / Kota	5.624,9	Km	-	
		%		
Total	8.047,29			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022



Gambar 4. Capaian Kinerja Kemantapan Jalan di Provinsi NTB

Selain penanganan jalan Provinsi, dilaksanakan pula penanganan ruas-ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional sumber pendanaannya berasal dari APBN pada tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis Nasional
 1. Penggantian Jembatan Olor Gedang Cs (Myc)
 2. Pelebaran Jalan Pemenang – Bayan
 3. Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan – Sembalun
 4. Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan (Itdp Lombok / PhIn)
 5. Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan - Sembalun (Itdp Lombok / PhIn)
 6. Penggantian Jembatan TI. Longken Cs (Itdp Lombok/PhIn)
- b. Preservasi Jalan Dan Jembatan Nasional
 1. Preservasi Jalan Mataram - Gerung; Kopang - Praya - Sp. Penujak
 2. Preservasi Jalan Ampenan - Pemenang - Bayan - Sembalun
 3. Preservasi Jalan Cakranegara - Mantang - Kopang - Lb. Lombok, Mataram - Gerung – Lembar
 4. Preservasi Jalan Pl. Tano - Simpang Negara – Benete
 5. Preservasi Jalan Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar
 6. Preservasi Jalan Pal Iv - Km. 70 - Bts. Kota Sumbawa Besar
 7. Preservasi Jalan Balibunga - Madaprana - Bts. Kab. Dompu - Dompu - Hu'u
 8. Preservasi Jalan Sp. Banggo - Kempo - Kesi - Hodo - Doropeti - Lb. Kenanga
 9. Preservasi Jalan Sila - Bts. Kota Bima - Raba – Sape
 10. Penggantian Jembatan Godo Vi
 11. Preservasi Jalan Dan Jembatan Dalam Kota Mataram

b. Irigasi Cukup

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar se-Provinsi NTB menjadi kegiatan strategis selain kegiatan pengamanan daerah permukiman terhadap bencana banjir yaitu perkuatan tebing sungai.

Pada tahun 2022 Dinas PUPR melaksanakan rehabilitasi untuk 3 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi melalui pendanaan DAK yaitu : DI Gebong, DI Pelapak dan DI Embung Gapit. Rehabilitasi DI tersebut sepanjang ± 18.442 m, dengan luasan 3.103 Ha.

Di samping itu juga dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sebanyak 48 paket pekerjaan sepanjang \pm 6.300 m, pemasangan perkuatan tebing talud sepanjang 6685.71 m dan perkuatan tebing bronjong sepanjang 1.700 m. Pembangunan Sumur Bor Untuk Air Baku sebanyak 40 titik, adapun pembangunan dan rehabilitasi embung sebanyak 100 paket dengan total tampungan 600.000 m³.

Sedangkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dengan sumber pembiayaan APBN tahun 2022 Program strategis yang perlu diwujudkan itu mencakup terbangunnya prasarana SDA dibagi berdasarkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Program strategis pada Pulau Lombok terdiri dari pengembangan saluran *High Level Diversion* dan Pembangunan Bendungan Meninting. Sedangkan untuk Pulau Sumbawa Pembangunan Rababaka Kompleks, Labangka Kompleks, Interkoneksi DAS Brang Beh – Pulit dan DI Batu Bulan – Mamak, Advance Pelaparado Kompleks, Brang Rea Kompleks, sebaran embung-embung "ranch", Woja Kompleks, Tanju dan Mila, Bintang Bano, Tiu Suntuk, Beringin Sila dan Kerekeh. Selain itu, pengelolaan SDA di NTB harus disertai pula dengan upaya pengembangan irigasi lahan kering untuk budidaya tanaman ekonomi tinggi (non padi) dan penyebarluasan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) di berbagai daerah aliran sungai (DAS) kritis/utilitas selain di DAS Palung yang masuk dalam WS Pulau Lombok yang saat ini sebagai percontohan dan DAS Moyo.

c. Air Minum/Air Bersih Untuk Semua dan SPAM Regional

Pelaksanaan kegiatan prioritas keciptakaryaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB yaitu penanganan cakupan air minum dan sanitasi termasuk penanganan drainase lingkungan. Berdasarkan data, Cakupan Air Minum di Provinsi NTB Pada Tahun 2022 mencapai 79,11 % sedangkan target RPJMD sebesar 78,45 %. Pencapaian cakupan air minum telah melampaui target RPJMD yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 0,6%.

Salah satu goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu dalam memastikan pencapaian akses universal dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Strategi:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi;

2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi;
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat (SPAMDes);
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
5. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi;
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Adapun pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Provinsi NTB pada tahun 2022 sumber dana APBD, sebagai berikut:

1. SPAM Dusun Bebak Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.
2. SPAM Dusun Bisok Bokah Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.
3. SPAM Dusun Kali Bening Desa Mamben Daya Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur.
4. SPAM Dusun Karang Anyar Timuk Desa Mamben Lauk Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur.
5. SPAM Dusun Lingkok Marang Desa Kotaraja Kec. Sikur Kab. Lombok Timur.
6. SPAM Pemotoh Tengah Desa Aik Berik kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.
7. SPAM Lingkungan Karang Baru Barat Desa Sasake Kec.Praya Tengah Kab. Lombok Tengah.
8. SPAM Masjid Nurul Iman Dusun Loang Sawak Desa Lendang Nangka Utara Kec. Masbagik Kab.Lombok Timur.
9. Jaringan perpipaan Air Bersih Rumah Sakit Abdul Kadir Manambai, kab. Sumbawa.
10. Pembanguna SPAM Air Bersih Pondok Pesantren Al-Majidiah Kab.Sumbawa.
11. SPAM Desa Klungkung Kec.Batu Lanteh Kab.Sumbawa.
12. SPAM Desa Mumbul Sari Kec. Bayan Kab.Lombok Utara.
13. SPAM Desa Tete Batu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur.
14. SPAM Dusun Sangiang Desa Selengen Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.
15. SPAM Dusun Sukarara Utara Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur.
16. Air Bersih Jaran Pusang Desa Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa.

17. Pembangunan perpipaan air minum pipa 2 inci Kel. UPT Perode SP III Kec. Plampang Kab. Sumbawa DESA PRODE SP 3, Kab. Sumbawa.
18. Saluran Air Bersih Kel. Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur Desa Wanasaba. Kec.Wanasaba. Kab. Lombok Timur.
19. Pembangunan SPAM Desa Gontoran Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.
20. Pembangunan SPAM Desa Gumantar Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara.
21. Pembangunan SPAM Desa Kekait Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.
22. Pembangunan SPAM Desa Menggala Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara .
23. Pembangunan SPAM Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.
24. Pembangunan SPAM Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara.
25. Pembangunan SPAM Desa Pengadangan Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur.
26. Pembangunan SPAM Dusun Barung Birak Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.
27. Pembangunan SPAM Dusun Lenggorong Desa Sambielen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.
28. SPAM Dusun Batulayar utara Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kab Lombok Barat.
29. Pembangunan SPAM Ulem-Ulem Berseri Dusun Orong Gerisak Desa Tetebatu Kec. Sikur Kab.Lombok Timur.
30. SPAM SMK IT Pancor Dao Batukliang Kab. Lombok Tengah.

Tabel 7. Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum	Ratio (%)
1.	Lombok Barat	779.199	650.786	83,52
2.	Lombok Tengah	1.117.648	928.693	83,09
3.	Lombok Timur	1.431.259	1.043.309	72,89
4.	Sumbawa	550.533	492.152	89,40
5.	Dompu	255.598	161.061	63,01
6.	Bima	555.233	469.837	84,62
7.	Sumbawa Barat	157.462	133.872	85,02
8.	Lombok Utara	267.192	123.156	46,09
9.	Kota Mataram	464.023	418.904	90,28
10.	Kota Bima	167.551	123.727	73,84
Jumlah		5.745.690	4.545.496	79,11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

d. Tata Ruang Berkelanjutan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di provinsi NTB yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dibutuhkan keterpaduan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan penataan ruang tersebut antara lain perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pembangunan nasional dan regional, terjadinya dinamika pembangunan ekonomi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RTRW NTB) Tahun 2009-2029. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB selaku pelaksana urusan Penataan Ruang berperan aktif dalam proses tersebut sebagai Tim Penyusun revisi RTRW Provinsi NTB. Akhir Tahun 2022, progres revisi RTRW Provinsi NTB proses melengkapi seluruh persyaratan diantaranya Berita Acara Peta Dasar BIG, Kesepakatan KP2B dengan Kabupaten/Kota, validasi KLHS, Berita Acara Pembahasan FPR, Kesepakatan Substansi Eksekutif dan Legislatif dan Harmonisasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk pembahasan lintas sektor di Kementerian ATR/BPN dan diharapkan Revisi Perda RTRW Provinsi NTB dapat ditetapkan pada tahun 2023.

Pentingnya penetapan Perda tersebut seiring dengan pesatnya permohonan investasi di daerah dan sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha maka dalam rangka kemudahan dan percepatan investasi dilakukan proses perijinan menggunakan sistem Online System Submission (OSS RBA). Penyederhanaan Perizinan Berusaha secara elektronik (OSS RBA) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK). OSS sebagai pintu masuk pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal

pemberian izin Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, namun sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi belum diberikan notifikasi untuk memvalidasi KKPR untuk Kode KBLI (07,08,09) sehingga kinerja Forum Penataan Ruang Provinsi NTB terkait permohonan KKPR kewenangan Provinsi belum ada sampai dengan akhir tahun 2022.

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi NTB sesuai RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022	
		Persentase	Rp	Persentase	Rp
Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	18,18 %	-	14,54 %	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

Pada tahun 2022 untuk penyusunan RTR, pemerintah Provinsi NTB hanya melaksanakan pekerjaan penyusunan revisi RTRW Provinsi NTB yang anggarannya ada di BAPPEDA Provinsi NTB. Sedangkan untuk penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk penganggarannya. Berikut target dan realisasi penyusunan RTR di Provinsi NTB s.d Tahun 2022 :

No.	Uraian	Target (s.d 2022)	Realisasi (s.d 2022)
	RTRW Provinsi NTB	1 Perda	-
	RTRW Kabupaten/Kota	3 Perda	2 Perda
	RDTR Kabupaten/Kota	6 Perda	6 Perda
	Total RTR	10 perda	8 Perda

Rincian RTR Realisasi :

- RTRW Kabupaten/Kota : 1. RTRW Kabupaten Sumbawa Barat
2. RTRW Kota Mataram
- RDTR Kabupaten/ Kota : 1. RDTR Perkotaan Taliwang
2. RDTR Perkotaan Tanjung
3. RDTR Perkotaan Mandalika

4. RDTR Perkotaan Rasanae Barat
5. RDTR Perkotaan Monta
6. RDTR Perkotaan Mpunda

Tabel 9.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Terhadap Indikator Kinerja RENSTRA

Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Satuan	Target Capaian Tahun 2022		Realisasi Capaian Tahun 2022	
		Persentase	Rp	Persentase	Rp
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89,69 %	-	76,38 %	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

Dari hasil analisis overlay tutupan lahan eksisting dengan pola ruang Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB terdapat persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 76,38 % karena semakin bertambahnya luas perubahan tutupan lahan yang terjadi akibat pembangunan dan alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi pertanian lahan kering atau ladang dan pertanian menjadi non pertanian. Dengan kedalaman skala RTRW Provinsi NTB sebesar 1 : 250.000 maka perubahan fungsi lahan yang kecil luasannya (kurang dari 5 Ha) akan sulit teranalisis dan kedepannya diharapkan Kabupaten/Kota melakukan analisis yang sama untuk akurasi. Realisasi Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang belum ada penambahan pada tahun 2022 karena tidak ada kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada tahun tersebut.

4. Prestasi/Penghargaan dan Inovasi

- Terbaik III Nasional Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Pusat;
- Perangkat Daerah dengan Pencapaian Terbaik dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal APIP Tahun 2018 – 2022;
- Pemenang Dengan Tata Artistik Terbaik Mars NTB Gemilang;
- Badan Publik Informatif Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 2022 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Kendala/Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan dan Solusi Bidang SDA - Irigasi

• Permasalahan

Realisasi Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi pada tahun 2022 sebesar 77,60% sudah melampaui target yang tertuang pada Renstra Revisi Dinas PUPR sebesar 77,00%. Untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja jaringan Daerah Irigasi (DI) diperlukan penyelesaian permasalahan yang disebabkan :

- (i) Minimnya operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi akibat kurangnya pendanaan.
- (ii) Alih fungsi lahan produktif menjadi perdagangan dan industri, serta alih fungsi kawasan penyangga tangkapan air menyebabkan tingginya sedimentasi pada jaringan irigasi.
- (iii) Kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi.
- (iv) Kurangnya koordinasi antara stakeholder mengenai permasalahan irigasi.
- (v) Minimnya sumber daya manusia di lapangan yang menjadi ujung tombak pelayanan air irigasi.
- (vi) Pemanfaatan air irigasi yang tidak sesuai pemanfaatannya.

• Solusi

- (i) Untuk mempertahankan kinerja jaringan irigasi pada tahun 2022 sebagaimana yang diharapkan, pembiayaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) selain bersumber dari dana APBD juga dibutuhkan bantuan dari Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (ii) Melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Operasi, Peningkatan Jaringan Irigasi, serta Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air (PSDA) Pulau Lombok dan PSDA Pulau Sumbawa;
- (iii) Rehabilitasi serta rekonstruksi dampak bencana alam dan kerusakan jaringan lainnya.
- (iv) Perlunya pemberian insentif kepada pengamat dan juru pengairan.

b. Permasalahan dan Solusi Bidang Bina Marga

• Permasalahan

- (i) Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau;

- (ii) Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai;
- (iii) Pembebanan berlebih (*overloading*) pada ruas - ruas jalan tertentu;
- (iv) Terbatasnya aksesibilitas bagi daerah potensial terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah;
- (v) Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
- (vi) Potensi kerusakan infrastruktur jalan yang cukup tinggi akibat bencana alam;
- (vii) Minimnya biaya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

- **Solusi**

- (i) Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- (ii) Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (iii) Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam;
- (iv) Revitalisasi UPT Balai pemeliharaan.

c. Permasalahan dan Solusi Bidang Cipta Karya - Air Minum

No	Permasalahan	Solusi
1	Belum adanya peta Kawasan kekurangan air minum	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan koordinasi dengan terkait wilayah kekurangan air minum – Survey wilayah kekurangan air minum
2	Belum terwujudnya pembangunan jaringan distribusi SPAM Bintang Bano berdasarkan nota kesepakatan Bintang Bano	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan koordinasi dengan OPD wilayah terkait – Pembangunan Jalur Distribusi Bagi Tahap 1
3	Belum adanya koordinasi dengan OPD terkait tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan rapat koordinasi atau advokasi dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan SPAM Kab/Kota – Monev penyelenggaraan SPAM di Kab/Kota – Penyusunan Kebijakan tentang Penyelenggaraan SPAM di wilayah Provinsi NTB

4	Masih terdapat di beberapa daerah kabupaten/kota yang belum terlayani SPAM, karena di daerah tersebut memiliki keterbatasan air baku.	<ul style="list-style-type: none"> – Menyusun dokumen rencana induk SPAM (RISPAM) Provinsi NTB – Menyusun JAKSTRADA Provinsi Nusa Tenggara Barat – Studi kelayakan SPAM REGIONAL – Pengumpulan data penunjang SPAM Regional – Perhitungan kebutuhan SPAM Regional – Penyusunan Rencana SPAM Regional – Penyusunan DED (detail Engineering Design) SPAM Regional
5	Database cakupan pelayanan air minum yang telah disusun belum dilengkapi dengan data primer	<ul style="list-style-type: none"> – Review Database yang telah disusun – Survey Jaringan SPAM yang telah Terbangun – Penyempurnaan Aplikasi Data Base Air Minum – Melakukan Koordinasi tentang cakupan air minum dengan Pemerintah Kab/Kota meliputi Jumlah KK dan Kondisi daerah yang telah terlayani

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022

d. Permasalahan dan Solusi Bidang Tata Ruang

Permasalahan	Solusi
Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan di Kabupaten/Kota masih rendah.	Percepatan penyusunan Revisi Perda RTRW dan Perkada RDTR di Kabupaten/Kota sebagai dasar perizinan, acuan pembangunan dan mendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Online Single Submission RBA (OSS RBA).
Belum optimalnya sinergitas antara Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Sektoral.	Konsistensi Rencana Program Sektoral dengan RTR yang ditetapkan.
Masih adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR).	<ul style="list-style-type: none"> • Segera menetapkan RDTR di Kabupaten/Kota; • Meminimalkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terutama di Kabupaten/Kota dalam bentuk pembinaan

	<p>oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari Instansi terkait dan hasil verifikasi lapangan (identifikasi tutupan lahan terbaru tahun 2022) terhadap Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota sehingga didapatkan hasil presentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang sesuai RPJMD.
Panjangnya proses penetapan materi teknis dan ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penetapan pengaturan pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi NTB.	Melakukan koordinasi intensif antar Tim Penyusun perbaikan RZWP3K dan Tim Penyusun RTRW Provinsi NTB serta Tim PO Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menuntaskan pengaturan pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi NTB.
Masih minimnya instrumen pengendalian tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perkada) tentang RDTR di Kabupaten/Kota dan mendorong Peraturan Daerah yang mengatur pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. • Mengoptimalkan peran PPNS penataan ruang dan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas PPNS.
Koordinasi di tingkat Pusat (Kementerian ATR/BPN) dengan Pemerintah Provinsi tidak hanya dalam proses perencanaan namun juga dalam proses penertiban pengendalian pemanfaatan ruang.	Bantuan teknis terkait audit tata ruang diharapkan dapat diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota.
Pasca ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan	Melakukan koordinasi intens antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dengan

<p>Nasional Nomor 1589/SKHK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa 7 Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat lokasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi namun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Terdapat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan di lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; 3. Terdapat bangunan dan/atau urukan di lokasi yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi; 4. Terdapat kesalahan basis data dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi. 	<p>melibatkan unsur Pemerintah Provinsi untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap LSD yang sudah ditetapkan dan melakukan kesepakatan terhadap luasan KP2B dengan Kabupaten/Kota.</p>
<p>Sampai dengan akhir Tahun 2022, belum ada notifikasi permohonan izin yang masuk ke dalam sistem OSS Pemerintah Provinsi untuk perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan sedangkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal pemberian izin Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan sehingga Pemerintah Provinsi belum bisa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsultasi intens dengan Pemerintah Pusat terkait penerbitan PKKPR kewenangan Provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi NTB untuk segera berkoordinasi dengan BKPM selaku penanggungjawab sistem OSS agar Pemerintah Provinsi dapat segera memverifikasi dan memvalidasi permohonan KKPR sesuai kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

memvalidasi KKPR dan kinerja Forum Penataan Ruang Provinsi NTB terkait permohonan KKPR kewenangan Provinsi belum ada.	
---	--

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2022